

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahun 2018 ini merupakan rencana tahunan sebagai usulan lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021 , yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan. Untuk Rancangan Rencana Kinerja Tahun 2018 ini telah disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ini, akan menjembatani Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem penganggaran. Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah merencanakan untuk melaksanakan 29 Kegiatan dari 8 Program.

Rencana Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman bagi jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan, guna pencapaian akuntabilitasnya secara optimal.

Bantul, 01 Juni 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Bantul



Ir. Sri Muryuwantini, MM  
NIP. 19620309 198903 2 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .....	
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU .....	11
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU .....	12
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	15
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	24
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	
3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL/DIY/ KABUPATEN .....	25

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL .....	26
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	29
BAB IV PENUTUP .....	40

## DAFTAR TABEL

TABEL 1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPMPT DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2017 KABUPATEN BANTUL .....	5
TABEL 2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KAB BANTUL .....	11
TABEL 3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN BANTUL .....	17
TABEL 4	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018 KABUPATEN BANTUL TAHUN .....	24
TABEL 5	KETERKAITAN PROGRAM/KEGITAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL/DIY/KABUPATEN .....	26
TABEL 6	KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	28
TABEL 7	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019.....	30



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai OPD penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu mempunyai indikator kinerja, yang salah satunya adalah ***pertumbuhan investasi***.

Kegiatan investasi (penanaman modal) merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif-tidaknya iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Hal seperti ini akan berdampak pada lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing.

Selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor juga terjadi karena:

1. tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung;
2. kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal; serta
3. belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanam modal di daerah.

Dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan online tracking system. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku.

Selaras dengan upaya yang ditempuh oleh BKPM RI, Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) DIY juga berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di DIY.

Visi BKPM DIY adalah ” ***Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta*** “

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi BKPM DIY sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal;
2. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah;
3. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

Secara regional, investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan porsi yang mencapai sekitar 90% baik untuk PMDN maupun PMA. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pengelompokan investasi (*aglomerasi*), antara lain daya dukung infrastruktur, SDM, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, BKPM DIY berharap dapat terjadi pertumbuhan realisasi investasi yang cukup signifikan di DIY, terutama di wilayah kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Bantul yang memang masih tertinggal dari wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Mengacu pada kebijakan BKPM RI dan BKPM DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terpacu untuk berupaya membangun iklim penanaman modal yang lebih kondusif di Bantul. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2017 – 2021 dan Rencana Kerja (Renja) tahunan, menjadi tonggak awal upaya peningkatan nilai investasi daerah.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018 merupakan Rancangan Rencana Kerja pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, setelah resmi pembentukannya di awal tahun 2017. Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan

diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional/DIY/Kabupaten, khususnya di bidang Penanaman Modal.

Tahun Anggaran 2018 adalah tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2017 - 2021 yang dituangkan dalam Rancangan Renja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-Daerah Tertentu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP;
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal ;
16. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

17. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor ...Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2018.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

#### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2018, meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

**Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu**

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perijinan dan Unit Penanaman Modal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Perijinan dan Unit Penanaman Modal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Bab ini berisi Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIJINAN DAN UNIT PENANAMAN MODAL PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGAGAN DAN KOPERASI TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPT dan**  
**Pencapaian Renstra DPMPT s/d Tahun 2017**  
**Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Rea98,66lisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>									
212	Bidang Urusan Penanaman Modal									
21201	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100%	100	95,99	95,99	100	98,66	100
2120136	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	108 ob	108 ob	108 ob	100	108 ob	108 ob	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Rea98,66lisis Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah paket jasa kebersihan	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	100	12 ob	12 ob	100
		Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
		Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	12 paket	12 paket	1 2 paket	100	12 paket	12 paket	100
		Jumlah paket surat kabar dan majalah	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
		Jumlah pengadaan ATK	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
		Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	100	10 buah	10 buah	100
		Jumlah paket komponen alat kebersihan	-	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100
		Jumlah Perangko dan Materai	489 lbr	100 lbr	489 lbr	489 lbr	100	1204 lbr	1204 lbr	100
		Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
		Jumlah penggandaan	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	128600 lbr	128600 lbr	100
		Jumlah paket servis perlengkapan kantor	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
		Jumlah paket premi asuransi	-	-	-	-	-	12 ob	12 ob	100
		Jumlah paket premi asuransi	-	-	-	-	-	12 ob	12 ob	100
2 12 01 37	Penyediaan Rapat-Rapat , Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	450 oh	450 oh	100
		Jumlah paket makanan minuman rapat (snack rapat)	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	500 oh	500 oh	100
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Makan Tamu)	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	300 oh	300 oh	100
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Snack Tamu)	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	200 oh	200 oh	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pembelian Aqua gelas, Aqua gallon	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
		Jumlah perjalanan ke luar daerah	19 oh	12 bl	19 oh	19 oh	100	880 oh	880 oh	100
		Jumlah perjalanan ke dalam daerah	108 oh	12 bl	108 oh	108 oh	100	880 oh	880 oh	100
2 12 01 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	12 bl	24 ob	24 ob	100	24 ob	24 ob	100
		Jumlah paket premi asuransi petugas keamanan	-	-	-	-	-	24 ob	24 ob	100
		Jumlah paket ATK	-	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100
2 12 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	90,76	90,76	100	96,92	100
2 12 02 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket jasa penambahan daya listrik	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
		Jumlah paket pengadaan tanaman hias	-	-	-	-	-	5 paket	5 paket	100
		Jumlah paket pengadaan alat kantor	5 paket	12 bl	5 paket	5 paket	100	69 paket	69 paket	100
		Jumlah paket pengadaan komponen bangunan gedung kantor	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100	3 paket	3 paket	100
2 12 02 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah paket pembelian komponen material pemeliharaan gedung	72 paket	12 bl	72 paket	72 paket	100	5 paket	5 paket	100
		Jumlah paket jasa tukang	-	-	-	-	-	140 oh	140 oh	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2120253	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
2120254	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
										100
21205	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100			100			100
2120518	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100	60 orang	60 orang	100
21206	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100			100			100
2120617	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah laporan kinerja SKPD,realisasi fisik triwulanan	48 dok	5 dok	48 dok	48 dok	100	48 dok	48 dok	100
21215	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Jumlah investor yang berinvestasi	7	6	7	7	100	8	8	100
2121518	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
2121519	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100	3 kali	3 kali	100
2121520	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengembangan potensi penanaman modal	3 kali	5 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
21216	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Persentase realisasi investasi	8	7	8	8	100	8	8	100
2121616	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	60	60	60	60	100	60	60	100
2121618	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian penanaman modal	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	3 dok	3 dok	100
4	<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
407	Bidang Fungsi Lainnya									
40723	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi</b>	Jumlah program SIM pelayanan on line	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
4072301	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
40728	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan</b>	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai standar mutu		100			100			100
4072811	Pendampingan Pelaksanaan Standar Manajemen Mutu	Jumlah paket pendampingan pelayanan sesuai standar mutu	2 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100	2 keg	2 keg	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
40731	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan</b>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP		73			75			77
4073102	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Jumlah peserta sosialisasi	450 org	6 kali	450 org	450 org	100	600 org	600 org	100
4073104	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah paket komponen operasional pelayanan Perizinan	12 paket	12 bl	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	100
4073105	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Jumlah perizinan terbit dalam satu tahun	6807	5362	6807	6021	88,45	7025	7025	100
4073106	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	Persentase Penanganan pengaduan	90	100	90	90	100	100	100	100
4073107	Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	Jumlah kajian tentang Peraturan Pemerintah tentang perizinan	1 perda	1 perda	1 perda	1 perda	100	2 perda	2 perda	100
4073110	Pengelolaan Perizinan On Line	Jumlah paket pengelolaan online	12 bl	1 paket	12 bl	12 bl	100	1 paket	1 paket	100
4073113	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
4073115	Peningkatan Kualitas SDM Customer Services Pelayanan Perizinan	Jumlah honor SDM Customer Servis perijinan	77 ob	12 bulan	77 ob	77 ob	100	77 ob	77 ob	100
4073116	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
4073117	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Jumlah peserta loka karya	75 org	60 orang	75 org	75 org	100	80 org	80 org	100
4073124	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	200 izin	100 izin	200 izin	200 izin	100	400 izin	400 izin	100

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersusun dalam tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Kabupaten Bantul**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang Diselesaikan Sesuai SOP			75	77	79	81	90		79	81	Realisasi melebihi target: dari 6930 permohonan izin, diselesaikan sesuai SOP sebanyak 6237
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			77,5	78,5	79	79,5	78,88		79	79,5	Realisasi melebihi target. Masing-masing indeks unit pelayanan masuk kategori baik.
3	Pertumbuhan Investasi			8,5	8,6	8,8	8,9	14,6		8,8	8,9	Realisasi melebihi target. Realisasi tahun 2016 mencapai 1.115.396.837.696,05. Terjadi kenaikan sebesar 142.143.455.561,11 jika dibandingkan realisasi tahun 2015 yang hanya mencapai 973.253.382.134,94

### **2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Perkembangan lingkungan strategis organisasi berkembang pesat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi mendorong percepatan perubahan lingkungan organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan permasalahan organisasi semakin kompleks. Demikian halnya yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu meliputi peluang dan tantangan.

#### **a. Faktor Kekuatan Organisasi:**

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- 2) Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengacu pada peraturan Bupati Nomor 123 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

- 3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4) Implementasi Standar Manajemen Mutu;
- 5) Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana;

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

- 3) Belum tersosialisasikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD baru di lingkungan Pemkab Bantul;

Tersosialisasinya keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan lebih memudahkan masyarakat umum dan investor dalam kaitannya dengan investasi dan pengurusan perizinan yang mereka perlukan.

c. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016;

Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah memberikan peluang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.

- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut

juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

3) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Bantul;

Tingginya minat investor untuk melakukan kegiatan usaha di Bantul akan mendorong aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada public dalam hal berinvestasi serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bantul.

4) Tersedianya kesempatan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM RI;

5) Upaya deregulasi pelayanan penanaman modal;

Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 menegaskan, bahwa PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal. Ketentuan ini tentu saja perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota untuk melakukan deregulasi penanaman modal. Regulasi daerah yang selama ini berlaku sebagai acuan pelayanan penanaman modal harus segera disesuaikan. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul perlu ditindaklanjuti dengan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

d. Faktor Tantangan Organisasi

1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan

masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal yang harus dilakukan;

- 3) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus izin itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

Dengan memperhatikan faktor kelemahan organisasi dan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan organisasi dan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan melaksanakan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan aparat untuk mengikuti Diklat Teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM;
- 2) Mengimplementasikan Pelayanan Perizinan On Line;
- 3) Menyenggarakan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit;
- 4) Menginisiasi regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP;
- 5) Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah melalui berbagai media promosi, seperti:  
liflet, brosur, infografi, siaran radio, surat kabar dan juga temu langsung dengan masyarakat pelaku usaha, dll;
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi pengelolaan perizinan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat perizinan dan mekanisme pengurusannya;
- 7) Mengoptimalkan implementasi Standar Manajemen Mutu dalam penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima di bidang penanaman modal

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Bantul berdasarkan RKPD Kabupaten Bantul yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Bantul.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, disajikan tabel berikut:



**Tabel 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017**  
**Kabupaten Bantul**

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja a	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	943.330.200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	943.330.200	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			335.667.700	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			335.667.700	
			Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	26.544.000			Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	26.544.000	
			Jumlah paket jasa kebersihan	12 paket	18.000.000			Jumlah paket jasa kebersihan	12 paket	18.000.000	
			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 paket	14.388.000			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 paket	14.388.000	
			Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	159.000.000			Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	159.000.000	
			Jumlah paket surat kabar dan majalah	12 paket	5.780.000			Jumlah paket surat kabar dan majalah	12 paket	5.780.000	
			Jumlah pengadaan ATK	12 paket	30.566.000			Jumlah pengadaan ATK	12 paket	30.566.000	
			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	10 buah	8.200.000			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	10 buah	8.200.000	
			Jumlah paket komponen alat kebersihan	12 paket	14.915.400			Jumlah paket komponen alat kebersihan	12 paket	14.915.400	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Perangko dan Materai	1204 lbr	4.697.000			Jumlah Perangko dan Materai	1204 lbr	4.697.000	
			Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	11.750.000			Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	11.750.000	
			Jumlah penggandaan	128600 lbr	19.290.000			Jumlah penggandaan	128600 lbr	19.290.000	
			Jumlah paket servis perlengkapan kantor	12 paket	10.915.800			Jumlah paket servis perlengkapan kantor	12 paket	10.915.800	
			Jumlah paket premi asuransi	12 ob	1.380.000			Jumlah paket premi asuransi	12 ob	1.380.000	
					567.882.500	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			567.882.500	
			Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)	450 oh	4.500.000			Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)	450 oh	4.500.000	
			Jumlah paket makanan minuman rapat (snack rapat)	500oh	12.500.000			Jumlah paket makanan minuman rapat (snack rapat)	500oh	12.500.000	
			Jumlah paket makanan minuman tamu (Makan Tamu)	300 oh	7.500.000			Jumlah paket makanan minuman tamu (Makan Tamu)	300 oh	7.500.000	
			Jumlah paket makanan minuman tamu (Snack Tamu)	200 oh	2.000.000			Jumlah paket makanan minuman tamu (Snack Tamu)	200 oh	2.000.000	
			Jumlah pembelian Aqua Gelas, Aqua Galon	12 bl	5.456.500			Jumlah pembelian Aqua Gelas, Aqua Galon	12 bl	5.456.500	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah perjalanan ke luar daerah	880 oh	362.376.000			Jumlah perjalanan ke luar daerah	880 oh	362.376.000	
			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	880 oh	173.550.000			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	880 oh	173.550.000	
	<b>Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Kab. Bantul</b>			<b>39.780.000</b>	<b>Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Kab. Bantul</b>			<b>39.780.000</b>	
			Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	36.600.000			Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	36.600.000	
			Jumlah paket premi asuransi petugas keamanan	24 ob	2.796.000			Jumlah paket premi asuransi petugas keamanan	24 ob	2.796.000	
			Jumlah paket ATK	12 paket	384.000			Jumlah paket ATK	12 paket	384.000	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kab. Bantul</b>	<b>Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>607.700.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kab. Bantul</b>	<b>Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>607.700.000</b>	
					<b>383.300.000</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	<b>Kab. Bantul</b>			<b>383.300.000</b>	
			Jumlah paket jasa penambahan daya listrik	1 paket	15.000.000			Jumlah paket jasa penambahan daya listrik	1 paket	15.000.000	
			Jumlah paket pengadaan tanaman hias	5 paket	5.000.000			Jumlah paket pengadaan tanaman hias	5 paket	5.000.000	
			Jumlah paket pengadaan alat kantor	12 paket	61.000.000			Jumlah paket pengadaan alat kantor	12 paket	61.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah paket pengadaan komponen bangunan gedung kantor	3 paket	128.000.000	
						Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul			25.000.000	
								Jumlah paket pembelian komponen material pemeliharaan gedung	5 paket	15.760.000	
								Jumlah paket jasa tukang	140 oh	9.240.000	
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	194.100.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	5.300.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	86.200.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	86.200.000	
						Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	60 orang	86.200.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Bantul	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	10.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Bantul	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan kinerja SKPD,realisasi fisik triwulanan	48 dokumen	10.000.000	
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Bantul	Jumlah investor	8	494.189.200	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Bantul	Jumlah investor	8	494.189.200	
						Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	36.848.000	
						Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 kali	273.409.200	
						Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan pengembangan potensi penanaman modal	3 kegiatan	183.932.000	
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kab. Bantul	Persentase realisasi investasi	8	148.771.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kab. Bantul	Persentase realisasi investasi	8	148.771.000	
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	60	58.848.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kajian penanaman modal	3 dokumen	89.923.000	
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Program SIM pelayanan On Line	1	216.350.000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Jumlah program SIM pelayanan on line	1	216.350.000	
						Penyusunan Sisteim Informasi terhadap Layanan Publik	Kab. Bantul	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	1	216.350.000	
8	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Apaaratur Pemerintah	Kab. Bantul	Persentase layanan perijinan sesuai standar mutu	100	100.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Apaaratur Pemerintah	Kab. Bantul	Persentase layanan perijinan sesuai standar mutu	100	100.000.000	
						Pendampingan Pelaksanaan Standar Manajemen Mutu	Kab. Bantul	Jumlah paket pendampingan pelayanan sesuai standar mutu	2 kegiatan	100.000.000	
9	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP	77	851.135.000	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP	77	851.135.000	
						Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi	600	90.000.000	
						Operasional Pelayanan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah komponen operasional pelayanan Perizinan	12 paket	60.000.000	
						Pendataan dan Penetapan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah perizinan terbit dalam satu tahun	7025	125.425.000	
						Penyelesaian pengaduan dan Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	Persentase Penanganan pengaduan	100	18.826.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penti ng
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengkajian Perda tentang Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah kajian tentang Peraturan Pemerintah tentang perizinan	2 perda	86.680.000	
						Pengelolaan Perizinan On Line	Kab. Bantul	Jumlah paket pengelolaan online	1 paket	215.000.000	
						Survei Kepuasan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 kali	7.900.000	
						Peningkatan Kualitas SDM CS Pelayanan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah honor SDM Customer Servis perijinan	77 ob	146.410.000	
						Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	28.000.000	
						Lokakarya Penanganan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah peserta lokakarya	80 org	25.810.000	
						Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	400 izin	47.084.000	
					3.457.675.400					3.457.675.400	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 untuk membahas program dan kegiatan yang dibutuhkan di Tahun 2018, telah dilaksanakan pada tanggal 9 - 21 Februari 2017. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul.

Namun demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah kecamatan se- Kabupaten Bantul, yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan dengan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan.

**Tabel 4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018**  
**Kabupaten Bantul**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	-	-	-	-



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL/DIY/KABUPATEN

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah merumuskan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, yaitu:

**“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”**. Dengan perumusan tema tersebut, Pemerintah telah menetapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas. Prioritas Nasional yang keempat adalah Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, yang salah satu Program Prioritasnya: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Adapun tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2018 adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”**.

Selanjutnya, tema pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah **“Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur dan Investasi untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”**. Tema pembangunan tersebut secara substansi telah selaras dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan DIY dan juga ikut menopang Prioritas Nasional Keempat serta Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul harus mengacu pada kebijakan Pusat, kebijakan DIY serta kebijakan Kabupaten Bantul.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, Visi Kabupaten Bantul dijabarkan ke dalam 5 Misi Kabupaten. Misi Kabupaten Bantul yang pertama adalah **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi** dan Misi Kabupaten Bantul yang ketiga adalah **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan**. Kedua Misi Kabupaten

iniilah yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Rencana Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang merupakan rencana tahunan, dirumuskan untuk melaksanakan Misi Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Secara lebih detail, keterkaitan antara Program-Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Misi Kabupaten dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5  
Keterkaitan Program/Kegiatan dengan Kebijakan Kabupaten

Misi Kabupaten	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja DPMPT
Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi; 2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima.	1. Presentase Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang Diselesaikan Sesuai SOP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas	Peningkatan daya saing produk daerah	Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi	Pertumbuhan Investasi

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu: **”TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah”** dijabarkan ke dalam 5 Misi, yaitu:

4. Mewujudkan aparatur yang berkualitas;
5. Menciptakan Pelayanan Prima;
6. Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah;
7. Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik;

8. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Visi dan Misi instansi yang dirumuskan tersebut, dimaksudkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul pada Misi pertama dan Misi ketiga Kabupaten Bantul.

Guna menopang Misi pertama Kabupaten Bantul, yakni **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menyelenggarakan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada public. Guna mengetahui sejauh mana kinerja instansi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selalu melakukan survey kepuasan masyarakat. Salah satu survey kepuasan masyarakat yang secara rutin dilaksanakan adalah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Bantul. Hal ini tentu saja akan menopang Misi ketiga Kabupaten Bantul, yakni **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan**.

Secara terperinci, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

<b>Visi :</b> <b>” TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH“</b>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan aparatur yang berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP
Misi 2: Menciptakan pelayanan prima	Mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat
Misi 3 : Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah	Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi	Persentase (%) pertumbuhan investasi
Misi 4 : Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik	Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat dan akurat, sekaligus tersedianya data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.	Persentase (%) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terakomodir SIM
Misi 5 : Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Terpantau dan terkendalinya kegiatan penanaman modal	Persentase (%) konsistensi perizinan dan nonperizinan

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp **5.269.583.950 (Lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2018 beserta pagu anggarannya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2018**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2	12	Bidang Urusan Penanaman Modal							
2	12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	1.309.513.150	APBD Kabupaten Bantul		100	1.451.566.927
2	12 01 36	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul		326.318.400				393.765.702
		Jumlah honor administrasi keuangan		108 ob	29.198.400			108 ob	32.118.240
		Jumlah paket jasa komunikasi, internet		12 paket	15.826.800			12 paket	17.409.480
		Jumlah pengadaan barang cetakan		12 paket	174.900.000			12 paket	192.390.000
		Jumlah paket surat kabar dan majalah		12 paket	6.358.000			12 paket	6.993.800
		Jumlah pengadaan ATK		12 paket	33.295.000			12 paket	36.984.860

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah pajak STNK kendaraan dinas		10 buah	9.020.000			10 buah	9.922.000
		Jumlah paket komponen alat kebersihan		12 paket	16.410.000			12 paket	18.047.634
		Jumlah Perangko dan Materai		1324 lbr	5.166.000			1456 lbr	5.683.370
		Jumlah paket komponen alat listrik		12 paket	12.925.200			12 paket	14.217.500
		Jumlah penggandaan		141460 lbr	21.219.000			155606 lbr	23.340.900
		Jumlah paket servis perlengkapan kantor		12paket	12.007.380			12 paket	13.208.118
		Jumlah paket premi asuransi		12 ob	1.518.000			12 ob	1.669.800
2	12 01 37	Penyediaan Rapat-Rapat , Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul		<b>703.476.150</b>				<b>749.210.765</b>
		Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)		550 oh	13.750.000			545 oh	5.450.000
		Jumlah paket makanan minuman rapat (snack rapat)		495 oh	4.950.000			605 oh	15.125.000
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Makan Tamu)		330 oh	8.250.000			363 oh	9.075.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Snack Tamu)		220 oh	2.200.000			242 oh	2.420.000
		Jumlah pembelian Aqua gelas, Aqua gallon		12 bl	6.002.150			12 bl	6.602.365
		Jumlah perjalanan ke luar daerah		942 oh	456.174.000			942 oh	477.173.400
		Jumlah perjalanan ke dalam daerah		1571 oh	212.150.000			1571oh	233.365.000
2	12 01 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul		<b>279.718.600</b>				<b>307.690.460</b>
		Jumlah paket jasa keamanan kantor		24 ob	40.260.000			24 ob	44.286.000
		Jumlah paket premi asuransi petugas keamanan		24 ob	3.075.600			24 ob	3.383.160
		Jumlah pembayaran jasa kebersihan		12 ob	19.800.000			12 ob	21.780.000
		Jumlah paket premi asuransi petugas kebersihan		12 ob	1.518.000			12 ob	1.669.800
		Jumlah honor SDM CS Perizinan		110 ob	181.500.000			110 ob	200.365.000
		Jumlah paket premi asuransi SDM CS Perizinan		110 ob	13.915.000			110 ob	15.306.500



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah pakaian kerja CS Pelayanan Perizinan		50 unit	18.750.000			50 unit	20.000.000
						Jumlah honor Tim PBJ		3 ok	900.000			3 ok	900.000
2	12	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	1.722.177.380	APBD Kabupaten Bantul		100	773.911.000
2	12	02	49		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Kab. Bantul		61.000.000				67.100.000
						Jumlah rehab gedung kantor		3 unit	54.600.000			3 unit	60.300.000
						Jumlah honor konsultan		2 ls	4.600.000			2 ls	5.000.000
						Jumlah honor Tim PBJ		6 ok	1.800.000			6 ok	1.800.000
2	12	02	51		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Kab. Bantul		1.382.300.000		Kab. Bantul		389.700.000
						Jumlah paket jasa penambahan daya listrik		1 paket	16.500.000			1 paket	18.150.000
						Jumlah pengadaan alat kantor (kamera, mobil operasional,mobil pelayanan)		4 unit	1.310.000.000		- Pengadaan mobil pelayanan diperlukan untuk mendekatkan akses pelayanan masyarakat - Perlu tambahan mobil operasional, agar pelayanan dapat lebih lancar dan kontinyu	2 unit	310.000.000

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pag u Indikatif				Lokasi
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										-		
					Jumlah pengadaan alat rumah tangga (AC Ruang, televisi)		7 unit	46.500.000			7 unit	51.150.000
					Jumlah pengadaan peralatan personal computer		3 unit	7.500.000			3 unit	8.250.000
					Jumlah honor Tim PBJ		6 ok	1.800.000			6 ok	1.800.000
2	12	02	52		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul		27.500.000				30.250.000
					Jumlah paket pembelian komponen material pemeliharaan gedung		5 paket	17.336.000			5 paket	19.069.600
					Jumlah paket jasa tukang		140 oh	10.164.000			140 oh	11.180.400
2	12	02	53		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul		233.510.000				256.861.000
					Jumlah pembelian BBM dan pelumas		17.788 liter	168.300.000			19.414 liter	185.130.000
					Jumlah servis kendaraan dinas		10 unit	23.100.000			10 unit	25.410.000
					Jumlah penggantian suku cadang		10 unit	22.110.000			10 unit	24.321.000
					Jumlah pengecatan mobil dinas		2 unit	20.000.000			2 unit	22.000.000

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	02	54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Bantul	12 bl	17.867.380			12 bl	19.654.000
2	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100	97.750.000	APBD Kabupaten Bantul		100	107.525.000
2	12	05	18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	60	97.750.000		Ada penambahan umlah narasumber dan biaya makan minum kegiatan	60	107.525.000
2	12	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	100	126.190.000	APBD Kabupaten Bantul		100	138.809.000
2	12	06	09	Penyusunan SMM	Jumlah paket pendampingan pelayanan sesuai standar mutu	Kab. Bantul	2 paket	110.000.000			2 paket	121.000.000
2	12	06	11	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah rencana kegiatan OPD		2 dokumen	5.190.000			2 dokumen	5.709.000
2	12	06	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah rencana kegiatan, laporan kinerja SKPD,realisasi fisik triwulanan		48 dokumen	11.000.000			48 dokumen	12.100.000

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang berinvestasi		8	543.608.120	APBD Kabupaten Bantul		8	597.968.932
2	12	15	18	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Temu Bisnis	Kab. Bantul	2 kali	40.532.800			2 kali	44.586.080
2	12	15	19	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	Kab. Bantul	4 kali	300.750.120			4 kali	330.825.132
2	12	15	20	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	Kab. Bantul	5 paket	302.575.000			5 paket	332.832.500
2	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi investasi		8	163.648.100	APBD Kabupaten Bantul		8	180.012.910
2	12	16	16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan ke PMA/PMDN	Kab. Bantul	120 kali	64.732.800			120 kali	71.206.080
2	12	16	18	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian penanaman modal	Kab. Bantul	3 kegiatan	98.915.300			3 kegiatan	108.806.830
4	07			Bidang Fungsi Lainnya								
4	07	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	Jumlah program SIM pelayanan on line		100	372.875.000	APBD Kabupaten Bantul			410.162.500
4	07	23	01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	Kab. Bantul	1 paket	372.875.000			1 paket	410.162.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	07	31			Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP		79	833.572.400	APBD Kabupaten Bantul	81	1.000.220.800
4	07	31	02		Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kab. Bantul	12 kali	99.000.000		12 kali	108.900.000
4	07	31	04		Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	Kab. Bantul	18500 buah	66.000.000		18500 buah	72.600.000
4	07	31	05		Pendataan dan Penetapan Perizinan	Jumlah perizinan terbit dalam satu tahun	Kab. Bantul	7100	125.725.000		7200	138.297.500
4	07	31	06		Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	Jumlah Penanganan pengaduan	Kab. Bantul	4	20.708.000		4	22.778.800
4	07	31	07		Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	Jumlah kajian perda tentang perizinan dan PM	Kab. Bantul	2 perda	86.680.000		2 perda	95.348.000
4	07	31	10		Pengelolaan Perizinan On Line	Jumlah paket pengelolaan online	Kab. Bantul	1 paket	280.000.000		1 paket	308.000.000
4	07	31	13		Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Kab. Bantul	2 kali	8.690.000		2 kali	9.559.000
4	07	31	16		Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	Kab. Bantul	1 kali	31.580.000		1 kali	34.738.000

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	07	31	17	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Jumlah peserta loka karya	Kab. Bantul	90	28.391.000			100	31.230.100
4	07	31	24	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah pengawasan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan	Kab. Bantul	7100 izin	51.798.400			7200 izin	56.978.240
4	07	31	25	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah peserta loka karya	Kab. Bantul	80	35.000.000			90	38.500.000

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bantul. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Pada Tahun Anggaran 2018, ada tambahan 3 kegiatan, beberapa indikator kegiatan dan juga ada penambahan usulan anggaran untuk beberapa kegiatan. Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Kegiatan dengan proyek Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 dinilai perlu diusulkan, karena merupakan kegiatan rutin per tahun dan harus menghasilkan Dokumen Rencana Kerja yang berkualitas melalui mekanisme penyusunan yang telah ditentukan.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur, ada tambahan kegiatan, yaitu Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung/Kantor. Kegiatan ini perlu diusulkan untuk merenovasi gedung kantor sesuai tuntutan implementasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Selain itu, di Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan, ada tambahan 2 indikator kegiatan, yaitu pengadaan mobil Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit dan mobil operasional. Pengadaan mobil Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit diusulkan untuk melanjutkan kegiatan yang telah dirintis sejak Tahun 2016. Uji coba Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat merasakan adanya kemudahan pelayanan perizinan di Bantul.

Pengadaan mobil operasional juga diusulkan, mengingat sampai saat ini, kuantitas dan kualitas mobil operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu masih kurang. Ada 3 bidang yang memerlukan sarana mobilitas ke lapangan, yaitu:

1. Bidang Pendataan dan Penetapan, untuk melaksanakan survei lokasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
2. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian, untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian izin terbit;

3. Bidang Penanaman Modal, untuk melaksanakan kegiatan pemantauan perusahaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pada Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan juga ada penambahan kegiatan, yaitu Kegiatan Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian. Kegiatan ini diusulkan untuk menindaklanjuti kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap izin terbit. Dengan diselenggarakannya kegiatan lokakarya, diharapkan ada kesepahaman tentang perlunya konsistensi kegiatan usaha dengan izin-nonperizinan yang dimiliki oleh pemohon perizinan dan nonperizinan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra), yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Mengkomunikasikan rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Hal ini penting dilakukan guna mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.



Dokumen rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang telah dirumuskan bersama ini, kiranya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Renja Tahun 2018 diharapkan juga menjadi acuan evaluasi di akhir tahun nanti. Harus diupayakan ada konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian target di akhir tahun.

Bantul, 01 Juni 2017

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu



Ir. Sri Muryuwantini, MM

NIP. 19620309 198903 2 002

